

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dan Implikasinya Terhadap Aktivitas Perkantoran Di Kantor Walikota Kupang Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan implementasi kebijakan

1. Komunikasi

Setelah melakukan penelitian di kantor Walikota Kupang Bagian Administasi Pembangunan Setda Kota Kupang tentang kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran, peneliti melihat bahwa komunikasi yang disampaikan tentang kebijakan PPKM dari pemerintah kota kepada bagian Setda Kota Kupang sudah sangat baik. Dimana penyaluran komunikasi tersebut tentang aturan-aturan PPKM salah satunya terhadap aktivitas perkantoran yang menggunakan sistem WFH 50% dan WFO 50% yang disampaikan melalui Surat Edaran Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan kejelasan isi dari aturan-aturan kebijakan PPKM tersebut. Kemudian masing-masing pimpinan instansi menyampaikan informasi tersebut melalui media chattingan grop sehingga para pegawai bagian adminsitrasi pembangunan Setda Kota Kupang melakukan aktivitas perkantoran dengan menggunakan jadwal sistem *Shift* pagi dan *shift* siang, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dalam aktivitas perkantoran yang mengakibatkan tidak konsistennya pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1: Hasil Penelitian Atas Komunikasi Terkait Kebijakan PPKM

No	Kriteria penilaian	Aspek yang diukur	Kategori
1.	Komunikasi	Transmisi	Terdapat penyaluran komunikasi yang baik terkait aturan-aturan kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran.
		Kejelasan	Terdapat kejelasan yang baik dari isi aturan-aturan kebijakan PPKM tersebut bagi aktivitas perkantoran.
		Konsisten	Terjadi penyimpangan yang membuat aktivitas perkantoran tidak konsisten sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

(Sumber :Olahan Peneliti 2021)

2. Sumber Daya

Ada empat sumber daya yang menjadi fokus kali ini, pertama sumberdaya staf, dari hasil penelitian diketahui bahwa ketersediaan sumber daya staf yang ada pada bagian administrasi pembangunan setda Kota Kupang kurang memadai untuk berjalannya kebijakan PKM sesuai yang diharapkan dimana jumlah staf yang kurang lebih 13 orang yang kemudian dibagi dalam dua kelompok shift pagi dan shit siang, namun harus tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Yang kedua adalah sumber daya fasilitas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumberdaya fasilitas seperti sarana dan prasarana yang di miliki oleh bagian AP Setda Kota Kupang ini sudah mendukung dengan baik dan melancarkan setiap aktivitas perkantoran seperti laptop, printer, komputer, dll.

Tabel 6.2: Hasil Penelitian Atas Sumber Daya Terkait Kebijakan PPKM

No	Kriteria penilaian	Aspek yang diukur	Kategori
1	Sumber daya	Staf	Kurang memadai
		Fasilitas	Tersedia dan mendukung

(sumber: olahan Peneliti 2021)

3. Disposisi

Sesuai dengan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa sikap para pegawai yang kurang memadai membuat kebijakan tersebut menjadi terhambat, sedangkan atasan telah membuat peraturan kerja sesuai dengan tugas masing-masing, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan pegawai yang malas tahu dengan tugas mereka.

Tabel 5.3 : Hasil atas Disposisi terkait Kebijakan PPKM

No	Kriteria penilaian	Aspek yang diukur	Kategori
1	Diposisi	Efek disposisi	Kurang memadai, contoh yang bisa diambil adalah sikap pegawai yang kadang malas, memberi dampak pada pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan pekerjaan kantor jadi tertunda.
		Wewenang	Baik dan memadai
		Melakukan pengaturan birokrasi (<i>staffing the bureaucracy</i>)	Baik dan memadai
		Insentif	baik dan memadai.

(sumber:Olahan Peneliti 2021)

4. Struktur Birokrasi

Sesuai dengan hasil wawancara, peneliti mendapati bahwa struktur birokrasi yang dilakukan oleh bagian administrasi pembangunan Setda Kota Kupang terkait dengan kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran cukup baik. Dalam pelaksanaan tugas mereka menyusun kegiatan kerja untuk pelaksanaan kegiatan yang fleksibel. Didalam pelaksanaan menunjukkan bahwa meskipun dengan keadaan penerapan kebijakan PPKM ini, mereka tetap melaksanakan tugas seperti biasanya dengan menggunakan aturan proses.

Tabel 6.4: Hasil atas struktur Birokrasi terkait kebijakan PPKM

No	Kriteria penilaian	Aspek yang diukur	Kategori
1	Struktur birokrasi	Membuat standar operasi prosedur (SOP)	Terdapat pelaksanaan kegiatan kerja yang baik
		Melakukan fregmentasi	Berjalan baik

(sumber:olahan peneliti 2021)

B. Kesimpulan dampak kebijakan

1. Dampak kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait dampak kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran dikantor Walikota Kupang Bagian administrasi Pembangunan Setda Kota kupang, dengan melihat capaian kerja sebelum dan sesudah adanya kebijakan PPKM tersebut yaitu sebelum adanya kebijakan PKM yang diadakan sistem *shift* ini membuat pekerjaan berjalan maksimal, namun setelah diadakan sistem *shift* tersebut membuat pekerjaan kurang maksimal. Contoh yang bisa di lihat adalah jam masuk pegawai sebelum adanya PPKM itu full dari pagi sampai sore, tetapi setelah adanya *shift* jam kerja Cuma setengah hari, hal ini menyebabkan dampak bagi pelaksanaan kerja yang semakin tertunda karena jam kerja yang sempit.

2. Dampak terhadap situasi atau orang (kelompok)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait dampak kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran bagi situasi atau orang maupun kelompok dengan melihat capaian kerja sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut maka peneliti menarik kesimpulan bahwa situasi dari kebijakan PPKM bagi para pegawai tidak memadai, dimana sebelum adanya kebijakan PPKM ini membuat pekerjaan kantor baik tugas pegawai kantor maupun laporan dari dinas-dinas berjalan dengan baik, namun setelah adanya kebijakan PPKM ini membuat dinas-dinas yang bersangkutan untuk melaporkan pekerjaan mereka menjadi terhambat, baik oleh waktu yang diadakan sistem jadwal *shift* ini maupun keadaan covid- yang membatasi orang.

3. Dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan yang akan datang

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan yang akan datang dalam kebijakan PPKM yang dilihat dari capaian kerja sebelum dan sesudah adanya kebijakan PPKM ini, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dampak pada kondisi sekarang sangat tidak memadai, dimana pegawai diharuskan tetap melakukan tugas sesuai perintah maupun aturan kerja yang ada, sedangkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terhalang oleh jam kerja yang terbatas dengan waktu baik itu jadwal *shift*. dampak yang akan datang adalah membawa pengaruh bagi kenyamanan pegawai yang sudah terbiasa dengan jam kerja yang setengah hari dan harus menyesuaikan diri kembali dengan jam kerja full apabila kebijakan PPKM ini sudah tidak diberlakukan lagi.

4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait dampak kebijakan terhadap biaya langsung dalam kebijakan PPKM, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada dampak yang terpicu oleh biaya langsung maupun tidak langsung baik pada kantor maupun dinas-dinas yang bersangkutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan lapangan pada aspek implementasi dan dampak kebijakan terkait kebijakan PPKM terhadap aktivitas perkantoran di kantor Walikota Kupang Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, peneliti menyampaikan hal-hal berikut:

1. Perlu melakukan rapat atau pertemuan serta evaluasi antara pimpinan dan para staf lingkup Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing staf/pimpinan walaupun dalam situasi PPKM yang menggunakan sistem *shift*.
2. Perlu meningkatkan sikap pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cara evaluasi tiap minggu sekali.
3. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor terkait dengan kebijakn PKM yang diberikan oleh pimpinan kepada staf, maka perlu dilakukan kejelasan waktu pengerjaan setiap tugas dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Angel Belzunegui-Eraso, & Erro-Garcés, A. (2020). Teleworking in the Context of the Covid-19 Crisis. *Sustainability*, 12(3662), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su1203662>.
- Anderson, J. (2000). *Evaluasi Dampak Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berliana, R. (2020). Flexible Work Arrangements: Pergeseran Budaya Kerja yang Kini Semakin Menarik. *Business Lounge Journal*. Diambil dari <https://www.blj.co.id/2020/04/02/flexible-work-arrangementspergeseran-budaya-kerja-yang-kini-semakin-menarik/>.
- Fitria, N. J. (2020). Peneraan Work From Home Dan Eork From Office Dengan Absensi Online Sebagai Implikasi E-Goverment Dimasa New Normal. *Civil Service*, 14 (1), 1-10.
- Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 Dan Tren Pembelian Online. (April). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723>.
- Moleong, T. D. (2000). *Metodologi Penelitian*. Carbondale: Shout Illiona University Press.
- Moleong, J. L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi Ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home / WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19 Bekerja dari Rumah (Working From Home / WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 126–150.

- Pujaningsih, N. N. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*, 6 (3).
- PP No 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disaese 2019 Diwilayah Kota Kupang.
- PP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Corona Virus Disaese 2019 Pada Tingkat Mikro/Kelurahan Dikota Kupang
- PP Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) Diwilayah Kta Kupang
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta Cv.
- Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. Pusat Penelitianbadan Keahlian DPR RI, XII(3), 13–18. Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL.
- Surat Edaran SE Walikota Kupang No 023/Hk.443.1/V/2021 Tentang Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disaese 2019.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7I3.15103>.